

Bapenda Kobar Gelar Rapat Koordinasi Peningkatan PAD dan Persiapan Pelatihan di Jogjakarta



MMC Kobar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat menggelar rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat, 20 Juni 2025, bertempat di Aula Cerdas Pajak, Kantor Bapenda Kobar.

Rapat koordinasi tersebut membahas dua agenda utama, yaitu: persiapan keikutsertaan dalam pelatihan yang akan diselenggarakan oleh PT CIP di Yogyakarta, serta sosialisasi surat Gubernur Kalimantan Tengah terkait pendataan kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Kepala Bapenda Kobar, Bapak M. Nursyah Ikhsan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan pajak daerah. Ia menyampaikan bahwa Bapenda Kobar akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unsur penunjang dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah.

“Kami berkomitmen untuk memfasilitasi berbagai kegiatan yang dapat mendorong peningkatan PAD secara nyata, berkelanjutan, serta berbasis data yang akurat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Bapenda Kobar juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah desa, tidak hanya sebagai pelaksana pemungutan pajak dan retribusi, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan pendataan potensi-potensi pajak di wilayah masing-masing.

“Kami berharap desa dapat secara mandiri melakukan pendataan terhadap objek-objek pajak dan retribusi seperti penginapan, rumah makan, warung kopi, objek wisata, serta kegiatan usaha lainnya yang berpotensi menjadi sumber PAD,” tambah beliau.

Lebih lanjut disampaikan bahwa potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa seharusnya dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan dalam pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) ke desa. Dengan adanya data yang valid dan pemetaan potensi yang terstruktur, diharapkan distribusi DBH dapat dilakukan secara lebih adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi setiap desa terhadap penerimaan daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Bapenda Kobar, para Kepala Bidang, pejabat fungsional hukum, fungsional analis keuangan pusat dan daerah, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni Arut Selatan, Kumai, Arut Utara, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada, dan Pangkalan Banteng.

Ketua DPC APDESI Kabupaten Kotawaringin Barat, Bapak Tohhari, menyampaikan aspirasi agar pelatihan yang akan diikuti tidak dibatasi hanya untuk 10 desa per kecamatan.

“Kami berharap seluruh desa yang memiliki kesiapan dan minat dapat difasilitasi untuk ikut serta, sehingga pemahaman mengenai pajak daerah dapat tersebar merata dan implementasi di lapangan menjadi lebih optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pandu Senjaya, Bapak Jumilan, mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai sudah tidak lagi dapat ditagih.

“Banyak piutang lama yang tidak diketahui siapa wajib pajaknya, bahkan sebagian sudah pindah domisili atau meninggal dunia. Kami berharap agar hal-hal semacam ini dapat dihapuskan agar tidak terus membebani laporan administrasi desa,” ungkapnya.

Melalui forum koordinasi ini, Bapenda Kobar berharap dapat terwujud sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penguatan sistem pendataan, penagihan, serta pelaporan pajak dan retribusi daerah yang bersifat partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Cerdas Pajak Bersama SINPELAJA

Kini lapor dan bayar pajak semakin mudah melalui *Sentuh Pajak Kobar App*. Unduh aplikasinya sekarang di Google Play Store dan nikmati kemudahan layanan perpajakan di ujung jari Anda!